

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA DAN KERANGKA PEMIKIRAN

1.1 Tinjauan Pustaka

2.1.1 Hubungan Internasional

Hubungan Internasional secara terminologis diciptakan oleh Jeremy Bentham yang merupakan seseorang dengan minat besar terhadap hubungan antar negara. Istilah Hubungan Internasional atau "*International Relations*" bukan satu-satunya istilah yang digunakan untuk pokok bahasan yang sama. Hubungan Internasional merupakan salah satu ilmu yang mempelajari berbagai macam aspek, perilaku, sistem, proses dan fenomena yang bersifat internasional. Hubungan Internasional adalah hubungan yang sangat kompleks karena dalam Hubungan Internasional banyak melibatkan Negara-negara yang berdaulat, maka dari itu hubungan ini dapat dikatakan cukup rumit mekanismenya dari hubungan antar manusia di dalam suatu Negara. Hubungan Internasional akan menjadi lebih sulit ketika dikaitkan dengan beragam sudut pandang yang dimana koneksinya tidak mudah. Sama dengan tujuan Hubungan Internasional itu sendiri yang berarti Hubungan Internasional merupakan ilmu yang membahas tentang perilaku para aktor Internasional baik itu Negara maupun non-negara. Aktor yang dianggap paling penting dalam Hubungan Internasional adalah negara, maka dari itu pergerakan dalam suatu Negara akan mendapat perhatian yang lebih di dunia Internasional. Tetapi, Interaksi dari non-negara juga menjadi

penting dikarenakan tidak semua interaksi Internasional hanya melibatkan Negara, namun actor non-negara pun terlibat. (Darmayadi 2015 : 22)

Pada perkembangannya, Ilmu Hubungan Internasional merupakan ilmu yang bersifat interdisipliner, yang berarti Hubungan Internasional tidak dapat dipisahkan dari aspek ilmu sosial lainnya yang saling berhubungan satu dengan yang lainnya. Dengan mengikuti sejarah dan perkembangannya, Ilmu Hubungan Internasional awalnya bertujuan untuk mencegah perang dan menjaga perdamaian. (Darmayadi, 2015:12).

Pada tahun 1990 saat Uni Soviet mengalami keruntuhan, muncul ragam baru terhadap perkembangan Hubungan Internasional. Dengan berakhirnya perang dingin yang meredakan persaingan antara dua kekuatan besar antara blok barat dan blok timur dapat mengganti sistem yang awalnya bipolar menjadi multipolar. Semula, bentuk persaingan dalam bidang ideologi antara Amerika dan Uni Soviet focus pada isu-isu keamanan (*high politics*). Setelah perang dingin, beralih menjadi lebih focus pada hak asasi manusia, isu-isu ekonomi, terorisme ataupun lingkungan (*low politics*). (Perwita & Yani, 2017 : 5).

Hubungan Internasional Kontemporer ialah suatu interaksi yang mengaitkan fenomena sosial yaitu terkait ideologi, politik, hukum, sosial, budaya, hankam dan ekonomi diantara para actor internasional baik itu dalam ranah pemerintah ataupun non-pemerintah. Hubungan Internasional Kontemporer juga tidak semata hanya membahas tentang politik tetapi membahas subjek lain yang memiliki interdependensi yang terdiri dari ekonomi, hak

asasi manusia, keamanan, isu lingkungan, organisasi internasional, kesenjangan dan ketimpangan. (Perwita&Yani, 2017:8).

Dinamika Hubungan Internasional menunjukkan perubahan yang mencolok selama satu dasawarsa terakhir dengan perubahan dalam substansinya dari waktu ke waktu. Munculnya masalah-masalah baru telah merubah wajah dunia seperti muncul konflik etnis, terorisme internasional, globalisasi dan isu-isu lokal yang mendunia yang mana isu-isu tersebut membawa konsekuensi baru terhadap interaksi dalam hubungan internasional. (Perwita&Yani, 2017:10).

Ketika menjelaskan tentang Hubungan Internasional Shawn C. Smallman dan Kimberley Brown menyebutkan bahwa kajian dari hubungan internasional akan lebih tepat apabila disebut sebagai *global studies*, karena yang akan dipelajari pada studi Hubungan Internasional fokus pada globalisasi, perubahan dan dampaknya pada kemanusiaan, dan juga kajian Hubungan Internasional tidak luput dari ras, kelas, permasalahan gender, dan permasalahan internasional lainnya. Isu tersebut sangat berdampak pada masalah-masalah kemanusiaan yang ada pada lintas batas Negara, maka dari itu studi Hubungan Internasional yang dikenal selama ini merupakan salah satu bagian dari kajian global studi (Bakri, 2017:7).

Hal ini mengutarakan bahwa hubungan internasional mencakup seluruh bentuk dari interaksi. Interaksi tersebut bisa berupa konflik, perang, persaingan ataupun kerjasama. Tetapi tidak bisa dipungkiri bahwa kerja sama yang banyak dilakukan oleh suatu negara

didasari oleh kebutuhan atau kepentingan nasional dari negara terkait. Kerja sama dapat dijadikan sebagai salah satu upaya suatu negara agar bisa mencapai kepentingan nasionalnya.

(<https://ojs.unikom.ac.id/index.php/gps/article/view/2021/1360> diakses pada 27 april 2021 pukul 15.25).

2.1.2 Kepentingan Nasional

Konsep kepentingan nasional merupakan salah satu konsep penting dalam hubungan internasional, dan menjelaskan perilaku internasional suatu negara. Kaum realis percaya bahwa kepentingan nasional mencerminkan kekuatan suatu negara, kekuatan suatu negara dapat menguasai suatu negara, dan negara lain harus senantiasa mengembangkan dan memeliharanya. Tujuan kepentingan nasional adalah sebagai upaya suatu negara untuk bertahan dalam percaturan politik internasional (Perwita & Yani, 2017: 35).

Semua negara memiliki tujuan nasional yang ingin mereka capai. Tujuan dasar suatu negara melalui kepentingan nasional adalah merumuskan politik luar negerinya. Unsur-unsur pembentukan kepentingan nasional merupakan hal-hal penting bagi suatu negara, seperti keamanan, pertanian, kemiliteran, dan kesejahteraan ekonomi (Perwita & Yani, 2017: 35).

Bagi kepentingan nasional, peran negara sebagai pengambil keputusan dan peran penting dalam interaksi hubungan internasional berdampak pada negara dan masyarakat.

Karena bagaimanapun, kepentingan nasional yang ditetapkan oleh suatu negara akan mempengaruhi kesejahteraan dan stabilitas rakyatnya. Menurut Thomas Hobbes, negara adalah pemberi perlindungan bagi masyarakat karena negara merupakan bagian penting dari kehidupan masyarakat. Tanpa peran negara dalam menjamin kondisi ekonomi, keamanan dan kesejahteraan, kehidupan sosial akan sangat terbatas. (Jackson, 2009: 89). Secara konseptual, kepentingan nasional merupakan cerminan dari pergerakan politik luar negeri suatu negara. Seperti yang dijelaskan Kindleberger untuk kepentingan nasional: “...Hubungan antara tiap Negara tercipta karena adanya kelebihan dan kekurangan dalam produksi, keunggulan komparati (*Comparative advantage*) membuka peluang untuk Negara memenuhi kepentingan nasionalnya...”

Definisi ini menunjukkan bahwa setiap negara memiliki kelebihan yang tidak dimiliki negara lain, perbedaan budaya, gaya hidup, demografi dan faktor sejarah menentukan perbedaan antara satu negara dengan negara lainnya. Di sisi lain, negara bukannya tanpa kekurangan. Inilah mengapa negara didorong untuk bekerja sama dengan negara lain melalui kerja sama bilateral atau multilateral untuk mewujudkan kepentingan nasionalnya (Rahim, 2: 2014). Teuku May Rudy mengutarakan pandangannya, yaitu: “Sebelum merumuskan dan menentukan sikap dan kebijakan, kepentingan nasional biasanya digunakan sebagai sarana bagi pengambil keputusan untuk berinteraksi dengan negara lain. Mengingat setiap langkah politik luar negeri harus berpijak pada kepentingan

nasional, dan segala sesuatu digolongkan sebagai kepentingan nasional. harus dilindungi.
"(Rudy, 2002: 116).

Kepentingan nasional bermaksud untuk mengarahkan para pengambil keputusan suatu Negara dalam membuat keputusan eksternal Negara. Kebijakan luar negeri ini mencakup strategi, cita-cita, arahan, metode dan lain sebagainya, dengan itu Negara bisa melakukan interaksi dengan Negara dan aktor non Negara lainnya. (Jackson & Soerensen, 2014:439)

2.1.3 Kebijakan Luar Negeri

Kebijakan luar negeri adalah strategi yang dibuat oleh pembuat kebijakan untuk menghadapi negara-negara lain sebagai bagian dari kebijakan internasionalnya dan diformulasikan untuk mencapai tujuan nasional yang ditulis dalam kepentingan nasional suatu negara, sehubungan dengan kebijakan luar negeri yang dibuat untuk memenuhi keinginan dan kebutuhan masyarakat. Meskipun masyarakat tidak terlibat dalam perumusan kebijakan luar negeri, yang hanya ditentukan oleh pemerintah, untuk mematuhi kepentingan nasional, negara akan melakukan berbagai bentuk sikap, seperti realisasi kolaborasi bilateral, trilateral, regional dan multilateral , (Perwita dan Yani, 2017: 49).

Menurut Rosenau, kebijakan luar negeri adalah upaya negara dengan semua perilaku dan sikap yang telah dilakukan untuk mencapai keuntungan dari lingkungan eksternal, menurut dia kebijakan luar negeri, akan terus ada sebagai upaya untuk menjaga

kesinambungan negara. Menurut Rosenau, jika kita melihat kebijakan luar negeri lebih dalam, kita akan menemukan hal yang kompleks dan luas, termasuk kebutuhan internal dan eksternal, termasuk kehidupan internal dan eksternal, seperti aspirasi, atribut nasional, budaya, konflik, kemampuan, lembaga dan kegiatan rutin untuk mempertahankan identitas dari suatu bangsa. (Perwita dan Yani. 2017: 49).

Langkah-langkah untuk membuat kebijakan luar negeri, termasuk:

1. Menjelaskan rumusan kepentingan nasional kedalam bentuk tujuan nasional dengan mempertimbangkan tujuan yang jelas dan terfokus.
2. Membangun faktor situasional dalam lingkungan nasional dan internasional yang terkait dengan kebijakan luar negeri.
3. Menganalisis kemampuan nasional untuk mencapai hasil yang diinginkan.
4. Melakukan tindakan yang diperlukan.
5. Mengevaluasi kebijakan secara berkala terhadap kebijakan yang telah dibuat.

(Perwita & Yani, 2017: 50).

Didalam mengambil keputusan kebijakan luar negeri, ada 3 jenis keputusan, yaitu keputusan mikro, keputusan makro, dan keputusan krisis yang pengambilan keputusan ditentukan oleh beberapa faktor di bawah ini:

1. Struktur sistem internasional.
2. Kebutuhan sosial dan ekonomi juga adanya sifat domestik.

3. Situasi di mana perumus kebijakan mengevaluasi kondisi eksternal nilai kepentingan nasional.
4. Lokasi, kondisi dan lingkungan geografis dan ketersediaan sumber daya alam (Rudy, 2002: 28).

2.1.3.1 Tujuan dan Fungsi Kebijakan Luar Negeri

Tujuan dari kebijakan luar negeri dibagi menjadi 3 tujuan, yaitu kebijakan jangka pendek, menengah dan jangka panjang, kebijakan jangka panjang dalam politik internasional dimaksudkan untuk mencapai perdamaian, keamanan dan kekuasaan (Perwita dan Yani, 2011: 51).

Tiga tujuan dalam kepentingan luar negeri:

1. Tujuan kepentingan dan nilai inti.

Tujuan kepentingan dan nilai inti adalah sesuatu yang setiap orang akan melakukan apa saja untuk mencapainya, termasuk negara, tujuan kepentingan dan nilai-nilai inti terdapat dalam prinsip utama kebijakan luar negeri yang diterima masyarakat. Tujuan dalam kepentingan ini adalah bersifat jangka pendek, definisi nilai kepentingan dan nilai inti tergantung pada pembuat keputusan.

2. Tujuan jangka menengah

Jangka menengah memiliki beberapa tujuan, yang pertama adalah kesejahteraan sosial dan pengembangan ekonomi, tetapi tidak semua negara dapat memenuhi kebutuhan ini dalam diri mereka sendiri, maka negara akan memulai interaksinya dengan negara-negara lain untuk mematuhi kepentingan nasional mereka untuk kerjasama, bantuan luar negeri, perdagangan dan akses informasi. Yang kedua meningkatkan gengsi negara, saat ini, prestise suatu negara diukur dengan pengembangan industri dan teknologi, negara-negara berkembang mulai beranjak maju dengan harapan dapat mengejar perekonomian negara-negara berkembang dan negara-negara maju menerbitkan prestise mereka dengan kebijakan luar negeri. politik, kekuatan militer, bantuan luar negeri, jalan diplomatik dan kunjungan ke suatu negara. Yang ketiga adalah tujuan memperluas wilayahnya, terlepas dari apakah daerah itu penting atau tidak untuk strategi ekonomi, sosial dan strategi.

3. Tujuan jangka panjang

Tujuan jangka panjang adalah visi dan pendapat tentang ideologi sistem internasional. Perbedaan dalam tujuan jangka panjang dan menengah bukan hanya masalah waktu, tetapi alih-alih tujuan jangka panjang memiliki ruang lingkup yang berbeda. Negara-negara cenderung melakukan teknologi tertentu untuk mencapai tujuan jangka panjang (Setiawan dan Sulastri, 2017: 13)

Secara umum, kebijakan luar negeri melindungi aspek-aspek penting di suatu negara, fungsi umum kebijakan luar negeri, yang meliputi:

1. Melindungi keamanan nasional.
2. Meningkatkan kesejahteraan dan stabilitas ekonomi.
3. Membina bidang strategis dan penting melalui pengembangan bilateral dan multilateral.
4. Memajukan martabat manusia melalui peningkatan hak asasi manusia.

(Setiawan & Sulastri, 2017: 14)

2.1.3.2 Konsepsi Kebijakan Luar Negeri

Kebijakan yang dibuat oleh suatu negara dipengaruhi oleh beberapa hal, baik dari luar negeri maupun dari dalam negeri itu sendiri. Kebijakan luar negeri memiliki 3 konsepsi untuk menjelaskan hubungan antar negara dengan negara lain (Perwita dan Yani, 2011: 53).

1. Kebijakan luar negeri sebagai seperangkat orientasi (*as a cluster of orientation*).
Kebijakan luar negeri sebagai panduan bagi pembuat keputusan untuk menghadapi kondisi eksternal yang memerlukan perumusan kebijakan luar negeri berbasis orientasi yang mencakup sikap persepsi dan nilai historis dan lokasi strategis negara di kancah internasional.
2. Kebijakan luar negeri sebagai serangkaian komitmen dan rencana untuk bertindak (*as a sets of commitments to and plan or action*).

Kebijakan luar negeri dalam hal ini adalah komitmen dari pembuat kebijakan sehingga situasi lingkungan eksternal stabil dengan kebijakan luar negeri. Desain tindakan ini harus spesifik dan alat untuk mencapai tujuan ini harus memadai, kebijakan luar negeri dalam fase ini sulit untuk diamati karena disampaikan lebih pada konferensi pers atau komunikasi diplomatik.

3. Kebijakan luar negeri sebagai bentuk perilaku atau tindakan (*as a form of behaviour*).

Kebijakan ini berada di tingkat empiris, yaitu, langkah-langkah aktual yang berkorelasi dengan kondisi eksternal. Langkah-langkah ini dikembangkan berdasarkan orientasi umum dan dikembangkan oleh komitmen dan tujuan yang lebih jelas (Perwita dan Yani, 2011: 53-55)

2.1.3.3 Sumber-Sumber Kebijakan Luar Negeri

Dalam buku *World Politics: An Introduction*, James N. Rosenau membagi sumber kebijakan luar negeri menjadi 4 kategori, diantaranya:

1. Sumber sistematis (*Systemic sources*)

Sumber ini menjelaskan hubungan satu negara besar dengan lingkungan eksternalnya, serta pola aliansi masalah regional dan krisis. Apa yang dimaksud oleh negara besar diukur dengan seberapa jauh partisipasi dan kapasitasnya dalam struktur hubungan internasional.

2. Sumber Masyarakat (*Societal Sources*)

Sumber masyarakat adalah sumber yang berasal dari keadaan internal negara, sumber ini mencakup faktor historis, hierarki sosial, budaya, pembangunan ekonomi dan opini publik. Budaya dan sejarah termasuk nilai-nilai, norma, tradisi dan hal-hal yang terjadi di masa lalu. Pembangunan ekonomi mencakup kemampuan suatu negara untuk mencapai tujuan yang mendasarinya dalam menciptakan hubungan dengan negara lain. Struktur sosial termasuk SDM yang dimiliki oleh suatu negara dan seberapa tinggi level harmoni adalah suatu negara. Tanggapan masyarakat juga menjadi indikator perubahan dalam perasaan masyarakat di dunia luar.

3. Sumber Pemerintah (*Governmental Sources*)

Ini adalah sumber yang berasal secara internal sebagai tanggung jawab politik dan struktur pemerintahan, seperti pemilu, persaingan antara partai politik dan persiapan pembuat kebijakan untuk menghadapi kondisi eksternal.

4. Sumber idiosinkratik (*Idiosyncratic Sources*)

Sumber-sumber berasal dari internal negara-negara internal, sumber-sumber idiosinkratik melihat nilai, bakat dan kepribadian elit politik yang dapat mempengaruhi persepsi mereka tentang kebijakan negara Luar (Perwita & Yani, 2011: 57-58).

2.1.4 Pariwisata dalam hubungan internasional

Selain untuk mendukung perdagangan dan investasi mandiri negara, isu pariwisata merupakan salah satu isu yang diangkat dalam diplomasi ekonomi (Elizabeth, 2016: 7). Dalam implementasinya, diplomasi ekonomi melalui isu *trade, tourism and investment* (TTI) bertujuan untuk memberikan kemaslahatan yang sebesar-besarnya bagi kemaslahatan masyarakat. Pariwisata juga dapat menjadi isu penting untuk meningkatkan hubungan persahabatan bilateral, regional dan multilateral antar negara. Definisi menurut *World Tourism Organization (WTO)* dalam menyamakan beberapa istilah pariwisata, maka yang dimaksud dengan "*tourism*", "*visitor*", "*tourist*" dan "*same day tourist*" adalah:

- a. *Tourism* atau pariwisata dapat diartikan sebagai aktivitas manusia yang melakukan perjalanan di luar lingkungan sehari-hari dan hidup di suatu destinasi. Perjalanan ini untuk hiburan, bisnis, dll., Dan durasi perjalanan berkelanjutan tidak melebihi satu tahun.
- b. *Visitor* adalah mereka yang melakukan perjalanan ke daerah lain tidak lebih dari 12 bulan berturut-turut di luar lingkungan kesehariannya, dan tujuan perjalanan bukan untuk mencari nafkah di daerah tersebut.
- c. *Tourist* mengacu pada mereka yang bermalam di kediaman umum atau pribadi atau tinggal di tempat tujuan setidaknya selama satu malam.

- d. *Same Day Tourism* atau pengunjung harian semuanya adalah pelancong jarak pendek, mereka tidak bermalam di tempat tinggal umum atau pribadi di daerah tujuan (Ismayanti, 2010: 4).

Wisatawan menurut tempat asalnya dibedakan menjadi dua kategori yaitu:

- a. *International Tourism*, merupakan bentuk perjalanan yang dilakukan seseorang dari suatu negara ke negara lain.
- b. *Domestic Tourism*, merupakan bentuk perjalanan yang dilakukan seseorang di dalam negaranya sendiri (Chakraborty, 2008 : 5).

Dalam pariwisata internasional (*International Tourism*) terdapat istilah inbound dan outbound tourism.

- a. *Inbound* : sebutan bagi suatu wisatawan yang memasuki suatu negara.
- b. *Outbound* : sebutan bagi suatu wisatawan yang meninggalkan negaranya dan memasuki negara lain (Chakraborty, 2008 : 5).

Terdapat berbagai hal yang dapat memotifasi seseorang untuk melakukan perjalanan wisata. Motivasi dipandang sebagai keinginan psikologis yang mencakup bagian yang tidak terpisahkan dari hal yang dapat mendorong dan menarik seseorang untuk melakukan hal-hal tertentu. Menurut Dann (1981) dan Yoon & Uysal (2003) dalam Utama (2004) terdapat dua faktor kenapa seseorang memutuskan untuk melakukan perjalanan wisata yaitu faktor pendorong (*push factors*) dari dalam diri mereka sendiri dan faktor penarik (*pull factors*) yang berasal 38 dari tempat pariwisata yang mereka kunjungi.

Menurut MC Intosh (1977) dan Murphy (1988), pada dasarnya seseorang melakukan perjalanan motivasi oleh beberapa hal. Motivasi ini dapat dikelompokkan menjadi empat kategori utama, yaitu:

- 1) *Physical or Physiological motivation* adalah motivasi fisik, seperti relaksasi, kenyamanan, kesehatan, partisipasi dalam kegiatan olahraga, dll.
- 2) *Cultural motivation*, yaitu, motivasi untuk mengetahui budaya, bea cukai, tradisi dan seni daerah lain.
- 3) *Social or interpersonal motivation*, yaitu motivasi sosial, seperti keluarga, teman, mitra, melarikan diri dari sesuatu yang membosankan, ziarah, dll.
- 4) *Fantasy motivation*, yang merupakan motivasi daerah lain untuk melarikan diri dari rutinitas kegiatan yang membosankan dan dapat memberikan kepuasan psikologis (utama, 2014: 119).

Menurut *World Tourism Organizatin (UNWTO)*, wisatawan memiliki tiga kelompok tujuan, yaitu:

1. *Leasure and Recreation (Vakansi dan Rekreasi)* Semua kegiatan yang memiliki tujuan:
 - a. Vakansi dan rekreasi;
 - b. Mengunjungi peristiwa budaya;
 - c. Kesehatan;
 - d. Olahraga aktif (yang bukan profesional);

- e. Tujuan liburan lainnya termasuk dalam kategori Dewan.
2. *Business and Professional* (Bisnis dan Profesional) Beberapa tujuan kunjungan dalam kategori bisnis dan profesional adalah:
- a. Rapat;
 - b. Misi;
 - c. Insentif perjalanan;
 - d. Bisnis. Tujuannya terkait erat dengan pekerjaan. Perjalanan itu tidak memenangkan hidup, tetapi kegiatannya berdampak pada pekerjaan mereka.
3. *Other Tourism Purpose* (tujuan wisata lainnya) yang bertujuan:
- a. Belajar;
 - b. Pemulihan kesehatan;
 - c. Transit;
 - d. Tujuan lain termasuk dalam tujuan wisata lainnya. Untuk mencapai tujuan nasional untuk meningkatkan jumlah kunjungan wisatawan Muslim Indonesia ke Jepang, salah satu strategi Jepang adalah melalui promosi wisata dengan bersertifikat halal. Promosi ini sangat penting untuk memberikan informasi tentang berbagai tujuan pariwisata halal di Jepang, juga untuk mempromosikan produk halal di Jepang sehingga dapat menarik perhatian komunitas Muslim Indonesia untuk mengunjungi Jepang.

2.1.4.1 Pariwisata Halal

Pencetus pertama kali pariwisata halal adalah Crescent Rating. Crescent Rating merupakan otoritas global untuk wisata halal yang bisnis utamanya adalah riset dan sertifikasi halal, bekerja sama dengan MasterCard meluncurkan data *Global Muslim Travel Index (GMTI)* tahun 2017. Menurut GMTI, pasar wisata muslim akan terus tumbuh pesat dan nilai dari sektor tersebut diperkirakan akan mencapai US\$220 miliar pada 2020. Diproyeksikan juga akan mengalami pertumbuhan lagi sebanyak US\$80 miliar menjadi US\$300 miliar di tahun 2026. Sektor pariwisata memainkan peranan penting dalam ekonomi dunia karena dianggap sebagai salah satu kontributor pertumbuhan lapangan kerja dan pertumbuhan ekonomi di negara manapun. Sehingga pariwisata dapat pula dipandang sebagai salah satu sumber paling penting bagi Produk Domestik Bruto (PDB). Adanya peningkatan wisatawan muslim merupakan peluang dan tantangan untuk meningkatkan sektor pariwisata. Di dalam Al-Quran, banyak ayat yang mendukung untuk melakukan perjalanan yakni termaktub di AliImran: 137; Al-An'am: 11; Al-Nahl: 36; Al-Naml: 69; Al-'Ankabut: 20; ArRum: 9 dan 42; Saba': 18; Yusuf: 109; Al-Hajj: 46; Fathir: 44; Ghafhir: 82 dan 21; Muhammad: 10; Yunus: 22; dan AlMulk:15. Ayat-ayat Al-Quran tersebut mendukung perjalanan dengan tujuan spritual, fisik, dan sosial. Dari ayatayat tersebut dapat diambil hikmah bahwa penyerahan diri yang lebih dalam kepada Allah dimungkinkan dengan melihat langsung keindahan dan karunia ciptaan-Nya, serta memahami kecilnya manusia dapat mengagungkan kebesaran Tuhan. Perjalanan dapat pula

meningkatkan kesehatan dan mengurangi stres, sehingga memungkinkan untuk beribadah lebih baik.

2.2 Kerangka Pemikiran

Dalam Studi Hubungan Internasional, pariwisata merupakan salah satu studi hubungan internasional dikarenakan bisa dilihat dari aktor, kegiatan, serta tujuan yang akan dicapai disaat aktor yang merupakan subjek atau objek merupakan negara ataupun non negara. Pariwisata ialah sarana yang mampu mempengaruhi perubahan budaya didalam hubungan internasional dimana pertukaran informasi tersebut terjadi. Tujuan pariwisata dikembangkan bukan hanya sebagai hiburan, tapi pariwisata juga bertujuan untuk menunjukkan karakter yang berbeda dan citra suatu negara di kancah internasional.

Didalam hubungan internasional terdapat suatu konsep yang disebut kebijakan luar negeri. Kebijakan luar negeri suatu negara bisa juga disebut kebijakan hubungan internasional, adalah serangkaian tujuan yang didalamnya menjelaskan bagaimana suatu negara berinteraksi dengan negara-negara lain di dalam bidang ekonomi, politik, sosial dan militer; Dan pada tingkat yang lebih bawah juga menjelaskan hubungan bagaimana negara berinteraksi dengan organisasi non-negara. Interaksi ini dikaji dan dipantau dalam upaya memaksimalkan bermacam manfaat yang dapat didapat dari kerjasama multilateral internasional. Kebijakan luar negeri dibuat untuk membantu memenuhi aspek kepentingan nasional, keamanan nasional, tujuan ideologis dan kemakmuran ekonomi suatu negara.

Pariwisata adalah bagian dari pengembangan studi hubungan internasional, utamanya di bidang ekonomi untuk meningkatkan pemasukan negara dan mencapai kepentingan nasionalnya. Jepang adalah salah satu Negara dengan tujuan destinasi wisata luar negeri favorit para wisatawan asal Indonesia. Jumlah wisatawan asing di Jepang terus meningkat secara signifikan setelah Jepang melakukan kampanye promosi wisata bertajuk “*Visit Japan*” sejak tahun 2003. Terdapat 14 negara yang menjadi target promosi ini, yaitu Korea, Taiwan, China, Amerika, Hongkong, Inggris, Prancis, Jerman, Australia, Kanada, Singapura, Thailand, Malaysia, dan Indonesia. (Yuki Yamazaki : 2015)

Perubahan yang signifikan terjadi pada tahun 2013, disaat pertama kalinya jumlah wisatawan asing melewati angka di atas 10 juta orang. Diperkirakan sekitar 300.000 orang diantaranya merupakan wisatawan Muslim. Secara geografi lokasi Jepang terletak cukup jauh dari negara-negara Islam tetapi bisnis wisata halal di Jepang ini membuat para wisatawan muslim di Indonesia tertarik. Selain itu, penduduk Jepang yang beragama Islam pun populasinya sangat sedikit. Meskipun demikian, sebagai negara dengan jumlah penganut Islam yang minim didalamnya, Jepang dapat dikatakan sangat serius dalam hal mengembangkan pariwisata berbasis halal ini.

Maka dari itu penelitian ini mencoba untuk menjelaskan efektivitas dari Pariwisata Halal yang diterapkan Jepang sebagai salah satu kebijakan luar negerinya untuk memenuhi kepentingan nasional dari aspek pariwisata.

Secara lebih rinci kerangka pemikiran akan digambarkan

melalui

bagan tersebut:



Gambar 2.1

Kerangka Pemikiran

